



POLICY PAPER

Dr. Yunardi, S.KM. M. Kes Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Kabupaten Bungo

KAJIAN PERUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021-2026

Ringkasa Eksekutif

Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Memprioritaskan isu strategis dilakukan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan mempengaruhi rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan.

Dari permasalahan yang telah dikaji, untuk pembangunan 5 tahun kedepan Kabupaten Bungo menetapkan isu strategis pembangunan, yaitu : (1) Belum Optimalnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing, (2) Belum Maksimalnya Tata Kelola Pemerintahan, (3) Belum Memadainya Kualitas Infrastruktur dan Sistem Transportasi, dan (4) Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Optimal

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 27 bahwa Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Selanjutnya pasal 7 menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: a) teknokratik; b) partisipatif; c)politik; dan d) atas-bawah dan bawah-atas.

Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Sementara Permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah. Dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026, sesuai kententuan yang berlaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD, sebagai bahan masukan utama perencanaan RPJMD bagi Pemerintahan dalam periode 2021 - 2026.

POLICY PAPER

Rancangan Teknokratik ini akan diintegrasikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bungo yang terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020. RPJMD ini mencakup Agenda Pembangunan periode 2021 - 2026 dengan mempertimbangkan arahan kebijakan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026, hasil evaluasi RPJMD periode 2016-2021 dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan tahun 2021 - 2026.

TUJUAN

Tujuan perumusan permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Bungo adalah:

1. Untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya
2. Merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

PERUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi. Dalam perumusan masalah digunakan tiga konsep tentang masalah pembangunan yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah dan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Masalah adalah beberapa penyebab dari masalah pokok dipecahkan melalui rumusan strategi. Akar masalah adalah penyebab dari masalah yang dirinci, dipecahkan melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Penyelesaian permasalahan pembangunan merupakan esensi dari tujuan pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap. Dari hasil evaluasi dan analisis gambaran umum kondisi daerah maka masalah pokok, masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut.

Tabel

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bungo dengan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Nilai IPM Kabupaten Bungo	68,77	69,04	69,42	69,86	69,92
1	Pendidikan					
	- Harapan Lama Sekolah/HLS (th)	12,55	12,59	12,60	12,61	12,61
	- Rata-rata Lama Sekolah/RLS (th)	7,99	8,08	8,69	8,15	8,27
2	Kesehatan					

POLICY PAPER

	- Angka Harapan Hidup/AHH (th)	67,18	67,27	67,47	67,61	67,74
3	Ekonomi					
	- Pengeluaran Perkapita (ribu)	10.937	11.016	11.352	11.662	11.471
Nilai IPM Provinsi Jambi		69,62	69,99	70,65	71,26	71,29
1	Pendidikan					
	- Harapan Lama Sekolah/HLS (th)	12,72	12,87	12,90	12,93	12,98
	- Rata-rata Lama Sekolah/RLS (th)	8,07	8,15	8,23	8,45	8,55
2	Kesehatan					
	- Angka Harapan Hidup/AHH (th)	70,71	70,76	70,89	71,06	72,16
3	Ekonomi					
	- Pengeluaran Perkapita (ribu)	9.795	9.880	10.357	10.592	10.392

Sumber data: BPS Provinsi Jambi Tahun 2020.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa IPM Kabupaten Bungo selama 5 tahun terakhir lebih rendah dari Provinsi Jambi dan indikator penyusun IPM, yaitu Pendidikan (HLS dan RLS), kesehatan (AHH) Kabupaten Bungo masih dibawah Provinsi Jambi, namun untuk indikator ekonomi (Pengeluaran Perkapita) Kabupaten Bungo diatas Provinsi Jambi. Selanjutnya berdasarkan data tersebut diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Bungo lima tahun kedepan adalah "Kualitas Hidup Manusia".

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan utama dalam sektor pendidikan di Kabupaten Bungo, yaitu masih rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat. Adapun permasalahananya dijabarkan sebagai berikut:

- a) Rendahnya rata-rata lama sekolah.
- b) Sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi standar.
- c) Belum terpenuhinya tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi dan tersertifikasi.
- d) Budaya baca masyarakat masih rendah.

2. Kesehatan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk peningkatan taraf kesehatan penduduk baik upaya kuratif, preventif dan promotif. Pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah karena berpengaruh terhadap aspek pembangunan lainnya. Adapun permasalahan pembangunan bidang kesehatan sebagai berikut:

- a) Belum meratanya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.
- b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Bungo terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan dengan kondisi riil dilapangan yang disebabkan tidak terimplementasinya rencana tata ruang secara utuh. Adapun permasalahananya dijabarkan sebagai berikut:

- a) Seluruh kawasan belum memiliki akses infrastruktur yang berkualitas.
 - b) Sarana dan prasarana pendukung infrastruktur belum merata.
 - c) Belum optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
 - d) Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan dengan wilayah yang berbatasan.
 - e) Kurangnya ketatan terhadap regulasi tata ruang.
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah merupakan sarana dasar yang wajib dipenuhi setelah aspek pangan dan sandang terpenuhi. Meskipun kondisi riil persentase rumah layak huni di Kabupaten Bungo sudah mencapai 92,08 persen, hal tersebut masih menyisakan sekitar 7,92 persen penduduk Kabupaten Bungo yang berada dikawasan permukiman tidak layak huni. Kondisi tersebut diakibatkan karena masih lemahnya penanganan terhadap kawasan yang belum sesuai dengan standar kualitas lingkungan pemukiman.

5. Sosial

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Bungo akibat dari dinamika pertumbuhan wilayah, yaitu timbulnya persoalan kesejahteraan sosial dan tingkat pengangguran yang tinggi. Adapun permasalahan pembangunan daerah aspek sosial sebagai berikut:

- a) Perlunya update pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala melalui sistem yang terintegrasi.
- b) Belum optimalnya program penanganan PMKS.
- c) Belum tersedianya sarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d) Tingkat pengangguran tinggi.
- e) Penanganan masalah sosial PGOT (pengemis, gelandangan dan orang terlantar) belum optimal.

B. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Terkait dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bungo dalam peningkatan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a) Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di Kabupaten Bungo.
- b) Jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi.
- c) Kualitas tenaga kerja yang rendah.

2. Pemberdayaan Perempuan

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada aspek pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

- a) Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak.
- b) Rendahnya motivasi dan partisipasi perempuan dalam mengembangkan potensi dan berkiprah dalam ranah publik khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan hukum.

3. Pangan

Dalam upaya pertumbuhan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Bungo perlu memastikan hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan dan kemandirian pangan.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi aman terhadap ketersediaan bahan pangan, dengan jenis yang beragam, dan kualitas serta kuantitas yang baik dan cukup bagi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari beberapa faktor, yakni ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan kesejahteraan pangan. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bungo yang cenderung terus meningkat, stabilitas produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapat dikembangkan sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi kerawanan pangan. Sementara untuk kemandirian pangan diharapkan kondisi penduduk disuatu wilayah dapat secara mendiri memenuhi kebutuhan akan pangannya dengan memanfaatkan potensi dan produk hasil pertanian sendiri.

4. Lingkungan Hidup

Secara rinci permasalahan pembangunan dalam sektor lingkungan hidup dijabarkan sebagai berikut:

- a) Masih tingginya aktivitas pencemaran dan penurunan kualitas air sungai.
- b) Masih tingginya kerusakan hutan.
- c) Menurunnya keanekaragaman hayati.
- d) Instalasi pengolahan limbah rumah tangga dan industri masih rendah.
- e) Belum optimalnya pengolahan limbah sampah.

5. Perhubungan

Dalam sektor perhubungan, persoalan utama yang timbul, yaitu belum memadainya sarana dan prasarana transportasi penumpang dan barang baik dari segi kualitas dan kuantitas. Adapun permasalahannya dijabarkan sebagai berikut:

- a) Rendahnya pelayanan angkutan publik.
- b) Belum tersedianya sistem angkutan massal.
- c) Belum tersedianya sistem angkutan barang.
- d) Ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan belum optimal.
- e) Belum tertatanya sistem perparkiran.

6. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Secara rinci permasalahan pembangunan dalam sektor koperasi, UKM adalah sebagai berikut:

- a) Kuantitas dan produktifitas koperasi dan usaha kecil dan mikro belum optimal.
- b) Keengganahan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

7. Penanaman Modal

Secara rinci permasalahan pembangunan dalam sektor penanaman modal yaitu jumlah penanaman modal dalam negeri dan modal asing masih rendah.

C. Urusan Pemerintah Pilihan

1. Pertanian

Secara rinci permasalahan pembangunan dalam sektor pertanian yaitu sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya produksi komoditas pertanian dan revitalisasi sistem pertanian.
- b) Pemasaran produk pertanian masih rendah.

2. Perdagangan dan Industri

Secara rinci permasalahan pembangunan dalam sektor perdagangan dan industri yaitu sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.
- b) Belum optimalnya promosi pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif.
- c) Belum tersedianya kegiatan perdagangan dan jasa dalam menunjang potensi pariwisata daerah.

D. Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Pemerintahan

Dalam aspek pemerintahan, beberapa permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi Kabupaten Bungo sebagai berikut:

- a) Kapasitas aparatur pemerintah daerah belum optimal.
- b) Kualitas dan kuantitas produk hukum yang dihasilkan masih rendah.
- c) Pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi belum optimal.
- d) Belum optimalnya media publikasi pemerintah.
- e) Belum maksimalnya dukungan APBD untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan.
- f) Belum maksimalnya kebijakan yang menunjang *good governance*.

IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Masalah Isu Strategis Internasional

1. Komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Konsep Sustainable *Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

- a) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
- b) Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
- c) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d) Menurunkan angka kematian anak;
- e) Meningkatkan kesehatan ibu;
- f) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
- g) Memastikan kelestarian lingkungan hidup;
- h) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016-2030 antara lain:

- a) Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan;

- b) Pastikan Hidup Sehat Dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Segala Usia;
- c) Menjamin Kualitas Pendidikan Inklusif, Adil Dan Mempromosikan Kesempatan Belajar Seumur Hidup Untuk Semua;
- d) Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Semua Perempuan Dan Anak Perempuan;
- e) Memastikan Ketersediaan Dan Pengelolaan Yang Berkelaanjutan Air Dan Sanitasi Untuk Semua;
- f) Menjamin Akses Ke Energi Yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelaanjutan, Dan Modern Untuk Semua;
- g) Mempromosikan Pertumbuhan Yang Berkelaanjutan, Inklusif Dan Berkelaanjutan Ekonomi, Kesempatan Kerja Penuh Dan Produktif Dan Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua;
- h) Membangun Infrastruktur Tangguh, Mempromosikan Industrialisasi Insklusif Dan Berkelaanjutan Dan Mendorong Inovasi;
- i) Mengurangi Kesenjangan Di Dalam Dan Antar Negara;
- j) Membuat Kota-Kota Dan Pemukiman Manusia Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelaanjutan;
- k) Pastikan Pola Konsumsi Dan Produksi Berkelaanjutan;
- l) Mengambil Tindakan Segera Untuk Memerangi Perubahan Iklim Dan Dampaknya;
- m) Melindungi, Memulihkan Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelaanjutan Ekosistem Darat, Berkelaanjutan Mengelola Hutan, Memerangi Desertifikasi, Dan Menggantikan Dan Membalikkan Degradasi Lahan Dan Menghentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayati;
- n) Mempromosikan Masyarakat Yang Damai Dan Inklusif Untuk Pembangunan Berkelaanjutan, Menyediakan Akses Terhadap Keadilan Bagi Semua Dan Membangun Institusi Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif Di Semua Tingkatan; Dan
- o) Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelaanjutan.
- p) Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuknya Dimana-Mana;
- q) Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi,

2. Kesadaran Aksi Global terkait *Climate Action* (Aksi Iklim)

Konferensi Tingkat Tinggi Aksi Iklim (*climate action*) oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 2019 telah berhasil menyepakati *roadmap* untuk pijakan aksi bersama. *Roadmap* ini berfungsi sebagai pedoman dalam mendorong negara-negara dan *stake holders* lainnya untuk berbuat lebih banyak sejak *roadmap* disepakati. Kesadaran global akan aksi iklim ini lahir dari kenyataan bahwa tanpa akselerasi upaya perbaikan kondisi lingkungan secara bersama sama maka dunia berisiko tidak mampu menghindari perubahan iklim yang tak terkendali dengan konsekuensi bencana bagi manusia dan semua sistem alam yang menopang keberlanjutan hidup umat manusia.

Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam

perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, Masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (unfoundation.org, 2020).

Sesuai *roadmap* terbaru yang telah disepakati oleh PBB, maka sangat diharapkan mulai tahun 2020 secara global harus mulai terjadi proses dekarbonisasi dimana salah satu sumber utama dari emisi karbon berasal dari aktivitas ekonomi. Hal ini merupakan tantangan utama dalam aksi iklim ini, mengingat selalu ada *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Perlindungan terhadap ekosistem merupakan salah satu alternatif upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh semua negara, serta upaya untuk lebih beradaptasi untuk masa depan terkait pola hidup rendah emisi.

Berdasarkan *roadmap* tersebut semua negara diharapkan mengurangi lebih banyak emisi berdasarkan Perjanjian Paris. Semua negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam aksi ini, dan terutama negara ekonomi terkemuka yang tergabung dalam G20 (*Group of Twenty*). Indonesia yang tergabung dalam negara-negara G20 dipastikan akan menjadi bagian dari negara-negara utama yang diharapkan berperan lebih aktif dalam aksi iklim ini.

3. Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia (*Global Inequality Human Development*)

Perubahan paradigma dan pemahaman mengenai kesenjangan dalam pembangunan manusia (*human development*) merupakan salah satu hal utama yang ditekankan dalam laporan "*Human Development Report 2019*" oleh PBB. Lebih lanjut lagi diperlukan perspektif yang lebih menyeluruh dan luas terkait pemahaman kesenjangan dalam pembangunan manusia. Kesenjangan diharapkan tidak lagi dilihat hanya sebagai indikator yang hanya memiliki dimensi tunggal. Kerangka pikir terbaru dalam melihat kesenjangan mengharuskan pemangku kepentingan melihat kesenjangan. Pertama, lebih dari sekedar melihat kesenjangan pendapatan (ekonomi) sebagai indikator utama. Kedua, kesenjangan arus dilihat lebih dari hanya sekedar angka jauh tidaknya dari nilai rata-rata kondisi umum. Sedangkan ketiga, kesenjangan tidak bisa dilihat dari sudut pandang statis yang didasari kondisi saat ini, tetapi harus mulai dilihat dengan sudut pandang dinamik, utamanya dampak perubahan-perubahan yang terjadi dimasa depan dan pengaruhnya terhadap upaya penanganan kesenjangan (*Human Development Reports*, 2020). Pemahaman yang tepat terkait masalah kesenjangan akan sangat membantu kemajuan yang diterima sebagai hasil dari proses pembangunan.

Laporan terakhir dari PBB menunjukkan bahwa, secara global, kemajuan pembangunan manusia terhambat sebesar hampir 20% sebagai akibat berbagai kesenjangan yang ada. Kesenjangan tersebut antara lain; pelayanan pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta kesenjangan dalam

kualitas standar hidup. Selain itu laporan tersebut juga memprediksi bahwa dengan cara penanganan kesenjangan seperti saat ini maka setidaknya diperlukan waktu 100 tahun agar terwujud kesetaraan gender.

Secara umum, setidaknya hingga 2018, dampak kesenjangan di Indonesia terhadap berkurangnya nilai Human Development Index (HDI) masih lebih baik bila dibanding dengan rata-rata dunia. Akan tetapi bila dilihat dari tren jangka panjang telihat bahwa tren yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir relatif stagnan sedangkan tren dunia mengalami penurunan. Selain itu dikawasan Asia timur dan Pasifik, secara rata-rata, terlihat tren yang terus menurun dengan signifikan dan bahkan sejak tahun 2017 mampu menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kondisi di Indonesia.

Konteks persaingan global tentunya hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dan khususnya daerah-daerah di Indonesia yang berencana untuk bersaing secara global dan menjadi bagian dalam perekonomian global.

4. Revolusi Industri 4.0

Saat ini dunia sedang berada dalam permulaan era revolusi industri ke 4 atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 didefinisikan sebagai perubahan yang revolusioner berbasiskan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Oleh karena itu revolusi industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi informasi diterapkan pada semua Industri. Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan teknologi pintar (smart) modern. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi *internet of things* (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan komunikasi dan proses monitoring otomatis (*self monitoring*), serta produksi mesin pintar yang dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan manusia (Moore, 2019).

Istilah Revolusi Industri Ke-empat pertama kali dikenalkan oleh Klaus Schwab (2015), ketua eksekutif *World Economic Forum*, dalam artikel yang diterbitkan oleh Foreign Affairs dengan judul "Menguasai Revolusi Industri Ke empat". Topik tersebut kemudian menjadi tema pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia tahun 2016 , di Davos-Klosters, Swiss. Di mana selanjutnya pada 10 Oktober 2016, Forum Ekonomi Dunia mengumumkan pembukaan pusat revolusi industri ke-4 di San Francisco. Menurut schwab (2015) dalam revolusi industri ke-4 ini ditandai dengan penggabungan antara; perangkat keras, perangkat lunak, dan biologi (sistem fisik siber). Selain itu terjadi kemajuan yang signifikan dalam komunikasi dan konektivitas. Secara umum era ini ditandai dengan terobosan dalam teknologi baru di bidang-bidang seperti robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, *internet of things*, industri *internet of things*, desentralisasi konsensus, teknologi nirkabel generasi kelima, percetakan 3 dimensi (3D) , dan kendaraan otonom penuh (*fully autonomous vehicles*). Terdapat empat prinsip desain yang diidentifikasi sebagai integral dari revolusi industri 4.0, yaitu; Pertama,

"interkoneksi" yang menunjukkan kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui *Internet of things* (IoT), atau internet of people (IoP). Kedua, "transparansi informasi" dimana transparansi yang diberikan oleh teknologi Industri 4.0 memberi operator informasi yang komprehensif untuk menginformasikan keputusan. Interkonektivitas yang memungkinkan operator untuk mengumpulkan data dan informasi dalam jumlah besar dari semua titik dalam proses manufaktur, mengidentifikasi area utama yang dapat mengambil manfaat dari perbaikan untuk meningkatkan fungsionalitas. Ketiga adalah "asistensi teknis" yang berupa fasilitas teknologi dalam bentuk sistem untuk membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta kemampuan untuk membantu manusia dengan tugas-tugas yang sulit atau tidak aman/berbahaya. Dan, terakhir adalah "keputusan terdesentralisasi" yang merupakan kemampuan sistem fisik dunia maya untuk membuat keputusan sendiri dan untuk melakukan tugas mereka se-otonom mungkin (Gronau et all, 2016).

Revolusi Industri 4.0 memiliki tingkat kecepatan perubahan yang tidak pernah ada pada dalam sejarah revolusi industri sebelumnya. Revolusi Industri 4.0 memiliki kecepatan eksponensial, yaitu bergerak sedemikian dengan kelipatan yang luar biasa sehingga memiliki efek "*disruption*" industri disetiap negara pada keseluruhan sistem. Disruption ini terjadi secara meluas, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hukum, politik, sampai penataan kota, konstruksi, pelayanan kesehatan, pendidikan, kompetisi bisnis dan juga hubungan-hubungan sosial.

Pada bidang ekonomi pengaruh disruption ini sangat jelas terlihat. Bidang pekerjaan baru bermunculan dan sebagian pekerjaan lama berangsur hilang. Banyak pekerjaan biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mulai digantikan oleh tenaga mesin atau robot, yang berakibat kepada hilangnya sumber penghidupan manusia pada bidang-bidang tersebut. Akan tetapi disisi lain memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya. Pada saat ini sudah mulai bermunculan pekerjaan baru seperti; data miner, analis big data, ilmuwan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *cyber security*, *application designer*, *gene designer*, dan lain lain. Pada bidang organisasi dan institusi publik, *disruption* ini memaksa bidang tersebut untuk memikirkan ulang dan beradaptasi terkait bagaimana seharusnya mereka beroperasi di era ini. Pada masa revolusi industri sebelumnya, seorang pengambil keputusan baik pada pemerintahan maupun organisasi bisnis dan sosial memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dan menganalisa sebuah masalah yang muncul dan memutuskan respon yang diperlukan. Hal tersebut tidak berlaku lagi untuk era revolusi industri 4.0.

Dalam era ini respon serta pengambilan keputusan harus cepat, sehingga perlu memiliki integrasi data, kemampuan analisa big data dan perlu bantuan dari kecerdasan buatan. Pada bidang sosial kemasyarakatan revolusi industri 4.0 memunculkan beberapa fenomena baru yang perlu diantisipasi agar tidak membawa efek negatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk, disatu sisi, menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percayai. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan tersediri bagi masyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah "me-centered emergency" (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam

masyarakat. Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya.

Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbungan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya berbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul.

5. Konflik Regional: Sengketa Wilayah di Laut China Selatan

Sengketa Laut China Selatan melibatkan klaim terhadap wilayah maritim dan kepulauan di antara beberapa negara berdaulat di kawasan tersebut. Pada awalnya yang terlibat dalam konflik ini adalah; Brunei Darussalam, Republik Rakyat China (RRC), Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Akan tetapi sejak Maret 2016 Indonesia mulai terlibat dalam konflik ini dengan tidak diakui zona ekonomi ekslusif (ZEE) Indonesia oleh China dan berkembang ke arah konflik terhadap kepulauan Natuna Utara. China menganggap wilayah kepulauan Natuna utara bukan wilayah Indonesia dan oleh karena itu menganggap setiap upaya petugas keamanan laut Indonesia mengusir nelayan dan kapal penangkap ikan China tidak memiliki dasar negatif. Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat mampu untuk, disatu sisi, menyerap, menampung dan menerima modernitas baru tetapi disisi lain, tetap bisa mengamalkan kepercayaan dan nilai-nilai luhur yang mereka percaya. Hal ini berdampak pada munculnya kegalauan tersediri bagi masyarakat/komunitas tertentu. Fenomena lain yang muncul dalam era ini sebagai dampak dari proses digitalisasi adalah “me-centered emergency” (berfokus dan mementingkan diri sendiri) dalam masyarakat. Secara lebih luas dampak dari revolusi industri terlihat pada perubahan tingkah laku, pola komunikasi dan sosialisasi, pola belajar, privasi, kepemilikan, konsumsi, waktu bekerja, waktu istirahat, gaya hidup, dan sebagainya.

Bila disikapi dengan positif maka era ini sebenarnya membawa harapan, peluang dan juga tantangan. Peluang terbesar secara makro ekonomi adalah proses otomatisasi dan digitalisasi berpeluang meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang akan membuka pasar baru dan pada akhirnya mendorong pertumbungan ekonomi. Akan tetapi salah satu tantangan terbesar dari sisi makro ekonomi terkait dengan masalah ketenagakerjaan, terutama karena akan hilangnya berbagai jenis pekerjaan tradisional karena digantikan dengan sistem, aplikasi dan mesin/robot. Hal ini tentunya harus mulai dipikirkan dan diantisipasi agar mampu meredam dampak negatif yang timbul.

Secara ekonomi Laut China Selatan memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian regional dan dunia. Sepertiga dari perdagangan maritim dunia melewati Laut Cina Selatan setiap tahunnya dengan nilai US \$ 3,37 Triliun. Bagi China peran laut ini sangat penting karena sekitar 80% impor energi China melawati

wilayah laut ini. Selain itu 39,5 persen dari total perdagangan Tiongkok melewati Laut China selatan (UNCTAD, 2018). Selain sebagai jalur pelayaran yang sangat strategis dan penting, potensi sumber daya alam di wilayah Laut China Selatan juga sangat besar.

Selain potensi ikan laut yang sangat besar, wilayah ini juga teridentifikasi memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Kementerian Sumber Daya Geologi dan Pertambangan Republik Rakyat China memperkirakan bahwa Laut Cina Selatan berpotensi mengandung 17,7 miliar ton minyak mentah. Sebagai perbandingan, Kuwait, negara kaya minyak memiliki cadangan minyak bumi sebesar 13 miliar ton (Valencia, 2006). Sedangkan untuk cadangan gas bumi, menurut laporan Energy Information Administration (EIA) (2016), estimasi sumber daya gas alam di wilayah tersebut antara 190 triliun kaki kubik hingga 500 triliun kaki kubik. Terkait perselisihan wilayah ini, Pemerintah Indonesia secara aktif, baik melalui jalur diplomasi maupun keamanan, berusaha mempertahankan aplikasi zona ekonomi ekslusif sejauh 200 mil laut. Hal ini dipertegas dengan kunjungan kepulauan Natuna oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dengan kapal perang untuk menunjukkan otoritas Indonesia. Beliau memimpin delegasi tingkat tinggi, termasuk Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menteri negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan hal itu dimaksudkan untuk mengirimkan "pesan yang jelas" bahwa Indonesia "sangat serius dalam upayanya untuk melindungi kedaulatannya".

Terkait dengan keseriusan Pemerintah Indonesia melindungi kedaulatannya, saat ini Indonesia mengerahkan lebih banyak pasukan dan kapal patroli, dan untuk memperkuat pangkalan angkatan laut di wilayah tersebut. Sejak awal tahun 2020 disiagakan 600 pasukan marinir dan delapan kapal perang angkatan laut dari TNI AL termasuk fregat kelas Ahmad Yani, korvet kelas Bung Tomo, dan korvet ASW kelas Kapitan Pattimura dikirim ke daerah tersebut dengan dukungan TNI AL. Naval Aviation CN-235 MPA, TNI AU juga mengirimkan empat buah F-16 dan satu Boeing 737-2x9 Surveillance, serta memasang pesawat BAE Hawk.

Perkembangan kondisi di wilayah laut China Selatan perlu mendapat perhatian serius dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kedepan. Hal ini karena sepertiga dari jalur perdagangan dunia melewati wilayah tersebut. Selain itu Indonesia juga berbatasan langsung dengan wilayah tersebut, dan bahkan juga terlibat konflik teritori dengan China di wilayah kepulauan Natuna bagian utara. Oleh karena itu perkembangan kondisi diwilayah tersebut perlu dicermati dengan serius karena terkait secara langsung dengan perekonomian Indonesia dari sisi distribusi perdagangan internasional dan juga terkait secara langsung dari sisi pertahanan keamanan karena keterlibatan langsung pemerintah Indonesia pada konflik teritori di wilayah kepulauan Natuna bagian utara.

6. Perang Dagang Antara China Dengan Amerika

Perang dagang antara China dengan Amerika Serikat di mulai sejak Maret 2018. Pada tahun tersebut Amerika Serikat mulai menetapkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya untuk produk-produk dari China yang masuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa China melakukan "praktik perdagangan yang tidak adil".

Amerika menuduh China melakukan pencurian kekayaan intelektual dan pemindahan paksa teknologi Amerika ke China. Sebagai akibat dari praktik perdagangan yang tidak adil bagi Amerika Serikat adalah meningkatnya defisit neraca perdagangan Amerika Serikat. Defisit neraca perdagangan Amerika serikat terhadap China sebenarnya telah berlangsung lama, akan tetapi dalam 10 tahun terakhir semakin memburuk.

Pada perang dagang ini Amerika Serikat mengenakan dan meningkatkan tarif perdagangan, mulai 10% hingga 30% bagi ribuan produk China yang masuk ke negara tersebut. Amerika juga membatasi dengan ketat investasi dari China ke negara tersebut untuk sektor teknologi kunci (key technology sector), antara lain telekomunikasi, aerospace dan teknologi informasi. China kemudian membalas dengan melakukan hal yang serupa, yaitu mengenakan tarif kepada produk impor dari Amerika Serikat. China mengenakan tarif 5% hingga 25% terhadap ribuan produk dari Amerika Serikat yang masuk ke negara tersebut (Kapustina et all, 2020). Perang dagang antara AS dengan China ini mengancam perekonomian secara global, bukan hanya hubungan antara dua negara tersebut. Akibat pemotongan perdagangan AS-China, pertumbuhan ekonomi global bisa diperkirakan akan turun 0,5% pada tahun 2020 (Da Costa, 2019). Analis Bank Dunia dengan menggunakan alat analisis Model Computable General Equilibrium (CGE) menghasilkan perkiraan kondisi ekonomi global terkait perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Hasil dari perhitungan dengan menggunakan Model CGE antara lain; pengenalan tarif 25% untuk semua barang impor Cina ke AS akan mengurangi eksport dunia sebesar 3% dan produk global sebesar 1,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif perdagangan antara Amerika Serikat dengan China dapat menurunkan eksport global hingga 3% (674 miliar dolar) dan pendapatan global hingga 1,7% (1,4 triliun dolar) dengan kerugian lintas wilayah (Freund et all, 2018). Pada 15 Januari 2020, tanda-tanda awal gencatan senjata mulai terlihat, ketika kedua belah pihak menandatangani apa yang dikenal dengan "Kesepakatan Fase Satu". Pada kesepakatan ini kedua belah pihak secara resmi menyetujui penurunan tarif, perluasan pembelian perdagangan, dan komitmen baru pada kekayaan intelektual, transfer teknologi, dan praktik mata uang. Meskipun demikian belajar dari pengalaman sebelumnya, banyak pihak yang meragukan efektivitas "kesepakatan fase satu" ini.

Bercermin dari kesepakatan kedua belah pihak pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka pada Juni 2019 dimana para pihak sepakat untuk mulai menurunkan tarif perdagangan diantara mereka serta Amerika Serikat menghapus larangan investasi bagi perusahaan teknologi China dan sebaliknya China sepakat membeli produk pertanian Amerika Serikat lebih banyak lagi. Akan tetapi tidak lama kemudian perang dagang perlahaan terjadi lagi, dimana Amerika Serikat menuduh China memanipulasi mata uang mereka yang bertujuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan sebagian menetralkan efek tarif. Dari sisi China, perusahaan-perusahaan China dilaporkan berhenti membeli produk pertanian dari Amerika Serikat. Kemudian kedua negara segera mulai bertukar ancaman untuk menaikkan tarif perdagangan. Puncaknya adalah ketika China, pada gilirannya, memprakarsai kasus WTO ketiga terhadap AS dengan mempertanyakan alasannya untuk memberlakukan tarif. Mengabaikan hasil KTT G20 AS memperkenalkan yang baru daftar tarif impor

senilai \$ 125 miliar dari China. China kemudian memberlakukan tarif 5% untuk impor Minyak mentah AS dan barang lainnya senilai US \$ 75 miliar.

Belajar dari pengalaman sejarah, ketegangan antar dua negara adidaya ini sangat perlu tetap diwaspadai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan strategis Indonesia di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa baik Amerika Serikat maupun China adalah dua partner dagang Indonesia yang selama ini cukup penting. Baik Ekspor dan Impor Indonesia dari kedua negara tersebut selama ini cukup besar, oleh karena itu apapun yang terjadi di kedua negara tersebut, khususnya secara ekonomi, akan berdampak langsung dengan perekonomian di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah Isu Kebijakan Nasional

1. RPJMN Tahun 2020-2024

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Presiden menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 beserta isu strategisnya sebagai berikut:
 - a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
 - 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam
 - 2) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi
 - 3) Transformasi Struktural Berjalan Lambat
 - 4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
 - b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Ketimpangan Antar wilayah, yang ditandai dengan tingginya kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia; ketimpangan pendapatan; terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa; terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan; dan belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan Kawasan pedesaan, Kawasan transmigrasi, dan Kawasan perbatasan.
 - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata Kelola kependudukan
- 2) Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
- 3) Pemenuhan layanan dasar
- 4) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
- 5) Pengentasan kemiskinan
- 6) Peningkatan produktivitas dan daya saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - 1) Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa
 - 2) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia
 - 3) Belum mantapnya Pendidikan karakter dan budi pekerti
 - 4) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama
 - 5) Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan
 - 6) Belum optimalnya peran keluarga
 - 7) Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
- e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - 1) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
 - 2) Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman
 - 3) Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan
 - 4) Keselamatan dan keamanan transportasi
 - 5) Ketahanan kebencanaan infrastruktur
 - 6) Waduk multiguna dan modernisasi irigasi
 - 7) Konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat
 - 8) Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, energi dan ketenagalistrikan , infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
 - 9) Energi dan ketenagalistrikan meliputi keberlanjutan penyediaan, akses serta keterjangkauan dan kecukupan penyedian
 - 10) Transformasi digital meliputi penunrasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
 - 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - 3) Pembangunan rendah karbon
- g. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik
 - 1) Konsolidasi demokrasi
 - 2) Optimalisasi kebijakan luar negeri
 - 3) Penegakan hukum nasional
 - 4) Reformasi birokrasi dan tata Kelola
 - 5) Menjaga stabilitas keamanan nasional

2. Dampak Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah tentang Normal Baru (*New Normal*)

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara didunia untuk meresponsnya sangat bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan kemampuan recovery yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Survei yang dilakukan kepada 100 eksekutif ASEAN menunjukkan bahwa 40 persen responden mempercayai bahwa akan ada serangan kedua virus covid19 yang berdampak pada pertumbuhan jangka panjang yang lambat serta pemulihan ekonomi dunia yang terjadi perlahan. Pada skenario ini intervensi ekonomi dipercaya akan efektif dalam menopang konsumsi utama tetapi kemungkinan serangan kedua virus covid19 akan mengarah ke lockdown putaran kedua (McKinsey 2020). Lockdown putaran kedua ini yang dipercaya akan memperburuk kondisi ekonomi global serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara global.

Berdasarkan prediksi berdasarkan skenario tersebut diatas, maka tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 11,1% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Q4 2019. Beberapa negara berkembang ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Misalkan, Thailand (-13%), Malaysia (-13,5%), dan Filipina (-13,6%).

Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 10,3%, sedikit lebih bagus dibanding rata-rata penurunan ekonomi global. Pada akhir 2020 semua negara ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008, yaitu minus 11,5% hingga minus 5,3% untuk tahun 2020 dibandingkan dengan minus 2,2% pada 2008 dan menjadi 4,5% pada tahun 2009 (McKinsey 2020 & OECD 2010). Dari sisi perdagangan dunia negara-negara di Asia juga terdampak sangat parah. Perdagangan intra-Asia diperkirakan turun 13% dari 2019 hingga 2020. Sedangkan perdagangan dari Asia ke Barat turun sekitar 20%.

Hampir semua negara, upaya menangani pandemi covid19 sedang berlangsung. Sejumlah besar intervensi kesehatan masyarakat telah diterapkan. Pada banyak negara, diberlakukan sistem perawatan kesehatan seperti dalam kondisi perang, seperti untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, persediaan, dan pekerja terlatih. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pasokan medis yang sangat dibutuhkan. Perang melawan COVID 19 adalah hal yang harus dimenangkan terlebih dahulu saat ini jika kita ingin merencanakan arah yang tepat secara ekonomi dan sosial menuju kondisi normal baru. Kondisi normal baru adalah realitas baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tercapai kondisi normal baru maka dipastikan akan terjadi restrukturisasi dramatis terhadap tatanan ekonomi dan sosial.

Keberlangsungan bisnis dan keselamatan karyawan merupakan tantangan utama saat ini. Metode work from home atau pekerjaan jarak jauh menjadi metode utama

dimasa ini. Hampir semua lini bisnis mengalami perlambatan dalam aktivitas mereka. Dalam dunia pendidikan Institusi pendidikan beralih ke sistem belajar online sebagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun ruang kelas fisik ditutup. Pada sisi lain, dunia usaha dan pemerintah dipaksa untuk memenuhi permintaan di area kritis yang mencakup makanan, persediaan rumah tangga, dan barang medis. Pandemi covid-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter Bank sentral diseluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral dan pemerintahan hampir diseluruh dunia agar sistem keuangan masingmasing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang terbesar dalam hampir satu abad (McKinsey Global Institute, 2020) Menghadapi tantangan tersebut, ketahanan merupakan kebutuhan vital. Masalah jangka pendek pengelolaan kas untuk likuiditas dan solvabilitas jelas merupakan hal yang terpenting. Tetapi segera setelah itu, bisnis perlu bertindak berdasarkan rencana ketahanan yang lebih luas karena guncangan mulai meningkatkan struktur industri yang sudah mapan, mengatur ulang posisi kompetitif selamanya. Sebagian besar penduduk akan mengalami ketidakpastian dan tekanan keuangan pribadi. Pimpinan sektor publik, swasta, dan sosial perlu membuat keputusan "melalui siklus" yang sulit yang menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengingat kohesi sosial sudah berada di bawah tekanan berat dari populisme dan tantangan lain yang ada sebelum virus korona.

Ketika memasuki era normal baru maka tantangan pertama adalah mengembalikan bisnis ke operasional setelah penghentian atau penurunan drastis dalam operasi mereka, dan ini tidak mudah. Pengalaman dari negara-negara yang telah recovery dan memasuki normal baru lebih awal, seperti China, menunjukkan bahwa banyak rantai pasokan input (supply chain) yang belum sepenuhnya siap melayani kebutuhan industri. Selain itu perlu waktu bagi pekerja dan karyawan untuk mencapai tingkat produktivitas tenaga kerja sebelumnya.

Pada konteks ini peran pemerintah pada masing-masing negara sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia permasalahan terkait upaya recovery pada dunia usaha menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Selain keterbatasan sumber daya dan dana bagi intervensi juga besarnya ketergantungan impor terhadap barang modal dan bahan baku industri. Kondisi dimana masih banyak rantai pasokan (suplly chain) dari pihak luar negri yang belum recovery sepenuhnya tentu perlu dipikirkan dengan baik cara mengatasinya agar industri dalam negeri bisa segera berangsur-angsur beroperasi dengan normal dan penyerapan tenaga kerja kembali normal.

Meskipun demikian, negara-negara di Asia Tenggara masih memiliki beberapa potensi bagi percepatan recovery ekonomi mereka. Menurut study yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute (2020), setidaknya terdapat lima sektor yang sangat berpotensi, yaitu; (1) Sebagai pusat manufaktur; (2) Infrastruktur hijau; (3) investasi dalam sektor digital; (4) Pelatihan ulang bakat, dan (5) Industri makanan bernilai tinggi. Potensi ini bila mampu dimanfaatkan dengan baik, maka tidak hanya dapat mempercepat pemulihan ekonomi di negara-negara ini tetapi juga meletakkan dasar

untuk pertumbuhan yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang di ASEAN setelah era normal baru.

C. Identifikasi Masalah Isu Strategis Provinsi Jambi

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Kebijakan pembangunan Propinsi Jambi yang tercantum dalam RPJMD Propinsi Jambi Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yaitu "**Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT**". Visi tersebut diwujudkan melalui (misi) Misi yaitu :

- 1) Memantapkan tata kelola Pemerintahan.
- 2) Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.
- 3) Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jambi berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 meliputi :

- 1) Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum optimal.
- 2) Daya Saing Ekonomi masih rendah sementara daya dukung lingkungan semakin menurun.
- 3) Kualitas Sumber Daya Manusia belum baik dan merata.

D. Identifikasi Masalah Isu Strategis Daerah Kabupaten Bungo

Dari masalah pembangunan daerah yang telah teridentifikasi, yang potensil berpengaruh besar dalam pembangunan Kabupaten Bungo lima tahun kedepan adalah:

- 1) Kualitas manusia pada aspek pendidikan
- 2) Kualitas manusia pada aspek kesehatan
- 3) Kualitas manusia pada aspek daya beli
- 4) Infrastruktur dasar
- 5) Produktivitas sektor pertanian
- 6) Daya saing pariwisata
- 7) Tata kelola pemerintahan yang baik
- 8) Kemiskinan
- 9) Kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam

E. Prioritisasi Isu Strategis

Prioritisasi isu strategis dilakukan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan mempengaruhi rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan. Berdasarkan indentifikasi isu di atas, maka ditetapkan isu strategis Kabupaten Bungo untuk RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing.

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Tantangan dan peluang yang berkaitan erat dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing antara lain:

2. Belum Maksimalnya Tata Kelola Pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

3. Belum Memadainya Kualitas Infrastruktur dan Sistem Transportasi.

Pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim.

4. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Optimal.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang maksimal diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo pasca pandemi *covid-19*.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI/SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia maka Masalah pokok dalam pembangunan Kabupaten Bungo lima tahun kedepan adalah "**Kualitas Hidup Manusia**".

B. Rekomendasi/Saran

Dalam rangka penyelesaian masalah pokok di kabupaten Bungo sesuai periode RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 maka perlu:

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Perkapita, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup (AHH), maka perlu dilakukan koordinasi kepada semua perangkat daerah untuk menentukan program-program kegiatan yang terukur.
2. Prioritas utama yang akan didorong selama lima tahun ke depan adalah meningkatkan.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah Dan Rencana

POLICY PAPER

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo 2006 - 2026
Indeks Pembangunan Manusia, BPS Provinsi Jambi
Kabupaten Dalam Angka, BPS Kupaten Bungo
Nursini. 2010. Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Teori dan Aplikasi
Safi'I, H.M. 2009. Perencanaan pembangunan daerah. Averroes Press